PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK LAPAS DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PANGKALPINANG

Aliyah Putri, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Aura Fariza Yulianti Saputri, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Aulia Fariza Yulianti Saputri, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Cinta Pooja Irfadiyah, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Zahwa Rahmanda Aulyah, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Jeanne Darc Noviayanti Manik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

E-mail : aliyaahputrii@gmail.com

Abstract

This study examines the fulfillment of educational rights for children in the Special Guidance Institution for Children (LPKA) Class II Pangkalpinang. While education is a fundamental right for every child, its implementation within a correctional environment presents unique challenges. This qualitative research, using a case study method, analyzes how both formal and informal educational rights are fulfilled at the LPKA. The findings indicate that LPKA Class II Pangkalpinang has made efforts to meet the educational rights of its inmates through equivalent education programs (Package A, B, and C) in collaboration with the Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) of Pangkalpinang City. Furthermore, the educational implementation includes personality development through religious counseling, practical skills training (such as sewing and computer) in partnership with the Balai Latihan Kerja (BLK), and psychological support. Although the institution cannot yet provide on-site formal education, this non-formal and integrated approach aims to equip the children with the knowledge, skills, and morals necessary for social rehabilitation and optimal reintegration into society. The main challenges encountered include limited facilities and the need to improve teaching quality, which are areas of focus to ensure a comprehensive fulfillment of the children's rights.
Keywords: *Educational Rights, Special Guidance Institution for Children (LPKA), Child Inmates, Formal Education, Informal Education.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang. Meskipun pendidikan adalah hak fundamental setiap anak, implementasinya di lingkungan lapas memiliki tantangan unik. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus ini menganalisis bagaimana hak pendidikan, baik formal maupun informal, dipenuhi di LPKA tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Pangkalpinang telah berupaya memenuhi hak pendidikan anak binaan melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pangkalpinang. Selain itu, implementasi pendidikan juga mencakup pembinaan kepribadian melalui penyuluhan keagamaan, pelatihan keterampilan praktis (seperti menjahit dan komputer) bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), serta pendampingan psikologis. Meskipun belum

dapat menyediakan pendidikan formal di tempat, pendekatan nonformal dan terintegrasi ini bertujuan untuk membekali anak dengan pengetahuan, keterampilan, dan moral yang diperlukan untuk rehabilitasi sosial dan reintegrasi optimal ke masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan fasilitas dan perlunya peningkatan kualitas pengajaran, yang menjadi fokus perhatian untuk menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
Kata Kunci: Hak Pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak Binaan, Pendidikan Formal, Pendidikan Informal.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak sebagaimana diatur dalam Konstitusi[1] maupun berbagai instrumen hukum internasional, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia[2]. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk bagi anak-anak yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan[3]. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana mengembangkan potensi, membentuk karakter, serta membangun keterampilan hidup yang bermanfaat bagi masa depan anak[4]. Melalui pendidikan, anak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas wawasan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa.

Secara umum, pendidikan terbagi dalam dua ranah utama, yakni pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang melalui institusi resmi seperti sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta menghasilkan legitimasi akademik berupa ijazah dan sertifikat[5]. Sementara itu, pendidikan informal berlangsung di luar jalur formal, seperti dalam keluarga, masyarakat, atau berbagai program pembinaan, yang meskipun tidak menghasilkan ijazah, tetap memiliki kontribusi besar dalam pembentukan nilai, sikap, keterampilan sosial, serta karakter anak[6].

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), pemenuhan hak pendidikan menjadi isu krusial sekaligus tantangan. Anak yang menjalani masa pembinaan tetap memiliki

[1] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31.*
[2] *UNICEF Indonesia, Konvensi Hak Anak, Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990.*
[3] *Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*
[4] *Bidaya, Z., & Rangga, M. (2018). Kajian yuridis UU No.35 Tahun 2014 Prespektif Pendidikan. CIVICUS.*
[5] *Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
[6] *Hasbullah. (2015). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*

hak dasar yang sama dengan anak lainnya[7]. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan mereka tetap mendapatkan akses pendidikan, baik formal maupun informal, selama berada dalam lapas. Pendidikan di Lapas Anak tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga diarahkan sebagai sarana pembinaan moral, pengembangan keterampilan hidup, dan rehabilitasi social[8]. Hal ini sejalan dengan gagasan Tilaar (2000) bahwa pendidikan harus mampu menjadi wahana pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar pencapaian akademik[9].

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak di Lapas Anak dapat diwujudkan, baik melalui jalur formal maupun informal, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Fokus pembahasan diarahkan pada analisis aspek normatif (landasan hukum nasional dan internasional) serta aspek praktis (pelaksanaan pembinaan di lapangan)[10]. Namun, artikel ini memiliki keterbatasan. Pertama, analisis lebih banyak menggunakan studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu[11], sehingga belum menggambarkan kondisi empiris di seluruh Lapas Anak di Indonesia. Kedua, keterbatasan akses ke lapangan membuat tulisan ini tidak secara langsung merekam pengalaman anak binaan, sehingga hasilnya lebih bersifat deskriptif-analitis.

Secara teoritis, tulisan ini didukung oleh teori hak asasi manusia yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights), serta teori rehabilitasi yang memandang pendidikan sebagai instrumen penting untuk membina narapidana, termasuk anak, agar mampu kembali berfungsi dalam kehidupan sosial[12]. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan anak di Lapas Anak tidak hanya merupakan kewajiban hukum negara, tetapi juga bagian dari strategi rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berorientasi pada masa depan anak.

---

[7] *Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*
[8] *Direktorat Jenderal Permasyarakatam. (2012) Pedoman Perlakuan Terhadap Anak di Lapas Anak. Kementrian Hukum dan HAM RI.*
[9] *H.A.R. Tilaar. (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.*
[10] *Donnelly, J. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University Press.*
[11] *Studi literatur daru jurnal hukum Pendidikan, serta laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai anak dalam lapas.*
[12] *Clear, T. R., &Frost, N. A. (2014). The Punishment Imperative: The Rise and Failure of Mass Incarceration in America. New York University Press.*

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal terpenuhi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi pengalaman, kendala, dan implementasi pendidikan di dalam LPKA dari sudut pandang anak-anak serta pihak terkait secara kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan anak didik dan staf pengelola LPKA, observasi langsung proses pembelajaran di LPKA, serta kajian dokumen pendukung seperti peraturan LPKA dan catatan pendidikan anak. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak pendidikan dan kendala yang dihadapi.

Metode ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi lapangan, mencakup aspek sosial, psikologis, dan kebijakan yang berperan dalam praktik pendidikan formal di LPKA, sekaligus menggali solusi yang dapat diusulkan berdasarkan temuan yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Anak Didik Lapas Dalam Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang Berdasarkan HAM

Pemenuhan hak anak dalam pendidikan di LPKA Kelas II Pangkalpinang merupakan langkah nyata dalam menjamin pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak binaan di LPKA ini mendapatkan akses pendidikan meskipun tidak melalui jalur pendidikan formal di sekolah umum. LPKA menyediakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pangkalpinang, dilaksanakan selama tiga hari dalam seminggu. Program ini memungkinkan anak-anak untuk memperoleh pengetahuan dasar dan setara dengan jenjang pendidikan formal agar hak belajar mereka tidak terputus[13].

[13] https://www.ditjenpas.go.id/anak-binaan-lpka-pangkalpinang-antusias-ikuti-pendidikan-kesetaraan *diakses tanggal 08 September 2025.*

Selain pendidikan formal nonformal tersebut, anak-anak di LPKA juga mendapat pembinaan keagamaan dan pelatihan kemandirian yang bertujuan membentuk karakter serta memberikan keterampilan hidup. Pihak LPKA bersama tenaga pengajar dari SKB sangat mendukung dan antusias dalam menyelenggarakan proses pembelajaran ini, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan motivasi yang tinggi bagi anak-anak binaan. Program ini tidak hanya memenuhi hak pendidikan, tetapi juga mengarah pada pemulihan dan pemberdayaan anak sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial[14]. Tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik LPKA masih terdapat keterbatasan, seperti belum adanya penyelenggaraan pendidikan formal di tempat tersebut, keterbatasan fasilitas, serta kebutuhan peningkatan metode dan kualitas pengajaran. Hal ini menjadi perhatian agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak yang sesuai standar HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Peningkatan fasilitas pendidikan dan pelatihan serta pendampingan psikososial menjadi aspek penting dalam mendukung perkembangan anak binaan[15].

Pemenuhan hak anak di bidang pendidikan di LPKA juga diiringi dengan program penyuluhan hukum dan sosialisasi hak anak dalam proses peradilan yang diselenggarakan secara berkala. Kegiatan-kegiatan ini membantu anak memahami hak dan kewajibannya, serta memberikan edukasi agar anak mampu menghindari tindakan melanggar hukum di masa yang akan datang. Melalui pemahaman hukum ini, anak didik dapat diarahkan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan terhindar dari pengulangan kesalahan[16]. Secara keseluruhan, LPKA Kelas II Pangkalpinang telah berupaya memenuhi hak anak didik dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Meskipun belum dapat menyediakan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan program pembinaan lainnya memberikan kesempatan pendidikan dan pengembangan diri bagi anak. Komitmen LPKA untuk terus mengembangkan program pemulihan dan pemberdayaan anak menunjukkan keseriusan

[14] https://id.scribd.com/document/790423991/Laporan-Kunjungan-LPKA-PANGKALPINANG *diakses tanggal 08 September 2025.*
[15] https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/19460 *diakses 08 September 2025.*
[16] https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/penyuluhan-hukum-petasan-digelar-di-lpka-kelas-ii-pangkalpinang-edukasi-hukum-untuk-anak-didik-pemasyarakatan *diakses 09 September 2025.*

dalam menjamin perlindungan hak anak binaan sesuai prinsip HAM, dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih cerah bagi mereka[17].

2. Bentuk Implementasi Pendidikan Yang Diterima Oleh Anak Didik Lapas di LPKA Kelas II Pangkalpinang

Implementasi pendidikan di LPKA Kelas II Pangkalpinang difokuskan pada pemenuhan hak anak binaan untuk mendapatkan pendidikan meskipun berada di dalam lembaga pembinaan. Pendidikan formal masih dalam keterbatasan, sehingga LPKA memberikan program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan tiga hari dalam seminggu. Jenjang pendidikan yang diikuti oleh anak didik meliputi Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Sekolah Pendidikan Non Formal (SPNF) melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pangkalpinang sehingga anak tetap bisa memperoleh pengetahuan akademik dasar.

Selain pendidikan akademik nonformal, LPKA juga mengimplementasikan pembinaan kepribadian dan mental melalui penyuluhan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan moral, akhlak, dan spiritualitasnya. Berbagai lembaga seperti Kementerian Agama Kota Pangkalpinang turut dilibatkan dalam memberikan pembinaan rohani agar anak dapat memiliki bekal mental yang kuat dan membangun karakter positif selama masa pembinaan. Program pelatihan keterampilan juga menjadi bagian penting dari pendidikan bagi anak didik di LPKA. Pelatihan ini bertujuan mengembangkan kemandirian anak dengan memberikan berbagai keterampilan praktis seperti menjahit, komputer, otomotif, serta keterampilan hidup lain yang bisa berguna setelah anak keluar dari lembaga pembinaan. Pelatihan ini dilakukan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan instansi terkait, sehingga anak binaan tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga bekal keterampilan praktis untuk masa depan.

Secara sistematis, LPKA menyediakan ruang belajar dan fasilitas pendukung agar proses pendidikan berjalan efektif. Anak binaan mengikuti proses pembelajaran dengan

[17] http://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/1787/ *diakses 09 September 2025.*

antusias di ruang aula atau ruang kelas khusus yang telah disiapkan. Selain itu, pembinaan dilengkapi dengan pendampingan psikologis untuk membantu anak mengatasi masalah psikologis yang mungkin timbul selama masa pembinaan. Semua program pendidikan ini diselenggarakan dengan perhatian pada pemenuhan hak anak serta menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak selama mereka menjalani masa tahanan. Dengan implementasi pendidikan formal nonformal, pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikologis secara terintegrasi, LPKA Kelas II Pangkalpinang berkomitmen mempersiapkan anak-anak binaan untuk reintegrasi yang optimal ke masyarakat. Melalui pendidikan dan pembinaan ini, diharapkan anak-anak memiliki peluang lebih baik untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang cerah setelah menyelesaikan masa pembinaan di LPKA[18].

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi anak-anak yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Di LPKA Kelas II Pangkalpinang, pemenuhan hak pendidikan diwujudkan terutama melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, dan juga pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan hidup, dan pendampingan psikologis. Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan fasilitas dan belum adanya pendidikan formal di tempat tersebut, LPKA berupaya memberikan pendidikan yang komprehensif dan berorientasi pada rehabilitasi sosial serta pemberdayaan anak. Implementasi pendidikan di LPKA tidak hanya meliputi aspek akademik, tetapi juga pembinaan kepribadian dan peningkatan keterampilan praktis guna mempersiapkan anak binaan untuk reintegrasi ke masyarakat dengan masa depan yang lebih baik. Upaya ini didukung oleh sinergi antara lembaga, tenaga pengajar, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional.

[18] https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/669 *diakses 10 September 2025.*

2. Saran

Untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak didik, LPKA Kelas II Pangkalpinang disarankan memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan sarana dan prasarana belajar perlu dilakukan, termasuk ruang kelas, bahan ajar, dan fasilitas penunjang lainnya agar proses pembelajaran lebih optimal. Kedua, metode pembelajaran sebaiknya dibuat lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan anak, misalnya dengan pendekatan interaktif dan berbasis keterampilan praktis. Ketiga, kerja sama dengan lembaga pendidikan, Balai Latihan Kerja, maupun instansi swasta perlu diperluas untuk menyediakan program keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Keempat, layanan pendampingan psikologis harus ditingkatkan secara rutin guna membantu anak mengatasi trauma, membangun rasa percaya diri, serta mendukung kesiapan reintegrasi sosial. Terakhir, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan juga sangat penting, sehingga anak binaan dapat memperoleh dukungan yang kuat saat kembali ke lingkungan sosial. Dengan upaya yang terpadu ini, hak pendidikan anak di LPKA tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga mampu membekali mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik.

E. Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kampus yang telah memberikan dana dan dukungan penuh sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Bantuan dana tersebut sangat berarti dalam mendukung seluruh proses penelitian hingga selesai. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 2 yang telah memberikan izin, fasilitas, dan kesempatan kepada saya untuk melakukan riset di lingkungan tersebut. Dukungan dan kerja sama dari seluruh petugas dan staf LPKA sangat membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Tidak lupa saya sampaikan penghargaan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan membantu, baik dalam pengumpulan data, koordinasi, maupun dalam penyelesaian penelitian ini.

F. Daftar Pustaka

Bidaya, Z., & Rangga, M. (2018). Kajian yuridis UU No.35 Tahun 2014 dalam prespektif Pendidikan. CIVICUS

Clear, T.R., 7 Frost, N. A. (2014). The Rise and Failure of Mass Incarceration in America.

New York University Press

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2012). Pedoman Perlakuan terhadap Anak di Lapas Anak. Kementrian Hukum dan HAM RI.

Donnelly, J. Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University Press.

H.A.R. Tilaar. (2000) Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. Hasbullah. (2015). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO

PERSADA.

Studi literatur dari jurnal hukum, Pendidikan, serta laporan Komisis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai anak lapas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 31.

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UNICEF Indonesia, Konveksi Hak Anak, Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990

Babel, A. K. (2025, July 21). Penyuluhan Hukum PETASAN Digelar di LPKA Kelas II Pangkalpinang, Edukasi Hukum untuk Anak Didik Pemasyarakatan. Retrieved from Kabar Kantor Wilayah: 09 https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/penyuluhan- hukum-petasan-digelar-di-lpka-kelas-ii-pangkalpinang-edukasi-hukum-untuk-anak- didik-pemasyarakatan

ditjenpas. (2023, Oktober 20). Anak Binaan LPKA Pangkalpinang Antusias Ikuti Pendidikan Kesetaraan. Retrieved from Kememterian Imigrasi dan Pemasrakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: https://www.ditjenpas.go.id/anak- binaan-lpka-pangkalpinang-antusias-ikuti-pendidikan-kesetaraan

Ramadani, N. (2021). Penyuluhan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dalam membentuk karakter Andikpas di LPKA kelas II Kota Pangkalpinang. Retrieved from INSTUTITIONAL REPOSITORY: http://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/1787/

Sari, D. M. (2023). URGENSI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG TERHADAP PEMBINAAN ANAK DIDIK KASUS PENCABULAN. Retrieved from JURNAL ILMU HUKUM: https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/19460

Syahfa Rizi Rasta Buana, d. (2025). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Retrieved from JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM: https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1297http://repository.iainsasbabel.ac.id/id/eprint/1787/